

**Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Program JKN-KIS oleh
BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep
(Studi Kasus Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, Ganding)**

Oleh;

Junaidi¹, Mediansyah², Ainul Yaqin³

Abstrak

Hasil instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS. Upaya presiden tersebut disebabkan keberadaan implementasi pemberlakuan undang-undang pada program BPJS sangat lamban, terbukti peraturan pada tanggal 25 November 2011 baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014, belum lagi terkesan kekurangiapan pelaksana di lapangan, sehingga banyak menuai protes di beberapa daerah, karena berbagai hal.

Melalui kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudlatul Iman (STIDAR) Sumenep dengan pemerintah daerah kabupaten Sumenep mencoba untuk melakukan penelitian terhadap masyarakat Sumenep di tiga kecamatan meliputi kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk dan Ganding untuk mengetahui secara faktual terhadap kesiapan masyarakat Sumenep dengan adanya program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS, guna mengetahui sejauhmana kesiapan masyarakat sumenep maka Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STIDAR melakukan penelitian dengan judul; Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Mendukung Program Jkn-Kis Oleh Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif etnografis, sedangkan hasil dari kesimpulan penelitian antara lain minimnya kesiapan masyarakat terhadap program JKN-KIS BPJS karena kurangnya sosialisasi dipedesaan sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami terhadap tingkatan kelas BPJS dengan fungsinya, juga kurang adanya kesadaran dalam membayar iuran bulanan disebabkan belum adanya solusi cerdas dalam membayar iuran setiap bulan.

Keyword : Analisis Kesiapan, Program JKN-KIS, BPJS

¹ Ketua dan Dosen STID. Raudlatul Iman Sumenep

² Dosen STID. Raudlatul Iman Sumenep

³ Guru MA Ketua LP3M STID RAudhatul Iman Sumenep

Abstract

The results of Presidential Instruction No. 8th of 2017th concerning the Optimization of the Implementation of the National Health Insurance Program show as a form of government seriousness in the implementation of the Indonesia Health Card National Health Insurance Program (JKN-KIS) organized by BPJS. The president's effort was due to the implementation of the law on the BPJS program very slowly, as evidenced that the regulation on November 25, 2011th was only implemented on January 1th, 2014th, not to mention the lack of implementation in the field, so there were many protests in several areas, due to various things.

Through collaboration between Raudlatul Iman Institute of Dakwah Sciences (STIDAR) Sumenep with the Sumenep district government trying to conduct research on the Sumenep community in three sub-districts including Pragaan, Guluk-Guluk and Ganding sub-districts to find out factually the readiness of the societies in Sumenep with the JKN- KIS organized by BPJS. In order to know the extent of the societies in sumenep readiness, STIDAR Institute and Institute for Research and Societies Service (LP3M) conducted a research on the title; The Analysis of Society Readiness in Supporting Jkn-Kis Program by Bpjs Health in Sumenep Regency.

This study uses descriptive qualitative ethnographic methods, while the results of the research conclusions include the lack of community preparedness for the JKN-KIS BPJS program due to the lack of socialization in the countryside so that many people do not understand the level of the BPJS class with its function, also lack of awareness in paying monthly contributions due there is no smart solution for paying contributions every month.

Keyword: *Readiness Analysis, JKN-KIS Program, BPJS*

Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Artinya seluruh warga Indonesia nantinya wajib menyisihkan sebagian uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menandakan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS.

Upaya presiden tersebut disebabkan implementasi pemberlakuan undang-undang pada program BPJS sangat lamban, terbukti peraturan pada tanggal 25 November 2011 baru dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014, belum lagi terkesan kekurangsiapan pelaksana di lapangan, sehingga banyak menuai protes di beberapa daerah, karena berbagai hal. Mulai dari pelayanan yang kurang memuaskan (tidak seperti iklannya di televisi), klaim biaya operasional instansi pemberi layanan kesehatan yang lama „cair“, bahkan juga kendala tentang kisaran honor jasa dokter umum (sebagai ujung tombak fasilitas layanan primer) yang kurang memadai.

Oleh karena itu, pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan, dan hal ini perlu komitmen BPJS kesehatan untuk memperbaiki diri. Bila regulasi dan komitmen pelayanan tidak ditingkatkan maka BPJS Kesehatan akan terus menuai kritik dan akhirnya semangat memudar dan hanya meninggalkan sejarah kegagalan baik yang ada di UU SJSN (UU40/2004) ataupun di UU BPJS (UU 24/2011).

Sementara realita dimasyarakat mengindikasikan kebijakan pelayanan kesehatan rawat jalan di lapangan (puskesmas) kurang konsisten dengan aturan hukum di atasnya, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (sebagaimana dipromosikan di televisi sejak akhir 2013 lalu), sangat tidak sesuai dengan fenomena yang ada.

Persoalan tersebut berimbang pada besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, karena banyaknya pasien mendapat pelayanan yang kurang optimal dan lebih memilih meminta surat rujukan ke rumah sakit karena tidak tertangani dengan baik di puskesmas. Begitu menariknya fenomena ini untuk dilakukan penelitian disamping mendukung program prioritas kabupaten sumenep, sehingga penulis mengambil judul penelitian “Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep.”

Pembahasan

Fokus Kajian

Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Sesuai UU No. 40 Tahun 2004 Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pemerintah punya keinginan agar program JKN dapat terlaksana secara optimal, karena program JKN tersebut wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia dan pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah berkomitmen untuk mendukung program JKN-KIS dengan mendorong kepastian seluruh penduduk Kabupaten Sumenep menjadi peserta JKN-KIS atau dengan kata lain tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC), sehingga target nasional per 1 Januari 2019 minimal 95% penduduk sudah terdaftar dalam program JKN-KIS. Maka dari itu, perlu dilakukan identifikasi untuk mengetahui seberapa besar kesiapan masyarakat Sumenep untuk menghadapi hal tersebut, dimana masyarakat harus menjadi peserta dalam program JKN.

Berhubungan dengan lokus penelitian pada kajian Analisis Kesiapan Masyarakat dalam Mendukung Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep, peneliti mengambil sampel di tiga kecamatan meliputi; Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk dan Ganding karena dipandang bisa mewakili semua kecamatan di wilayah Sumenep disamping pada kecamatan tersebut terdapat beberapa pondok pesantren besar yang berdatangan dari berbagai daerah di wilayah kabupaten Sumenep.

Hasil identifikasi masalah dilokasi penelitian dapat dibatasi dan dijadikan temuan sebagai rumusan masalah, yaitu: (1) Seberapa besar kesiapan masyarakat dalam mendukung program JKN-KIS oleh BPJS kesehatan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding. (2) Kendala apa saja dalam mendukung program JKN-KIS oleh BPJS kesehatan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding. (3) Bagaimana upaya menangani kendala dalam mendukung program JKN-KIS oleh BPJS kesehatan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak geografis kabupaten Sumenep berada diujung timur pulau garam madura mencakup letak garis antara 113° 32" - 116° 16" Bujur Timur dan 4° 55" - 7° 24" Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan

Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau

yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ± 165 mi laut dari Pelabuhan Kalianget.

Gambar 1.1 Wilayah Kabupaten Sumenep



*JKN-KIS, Jaminan
Kesehatan Berkualitas dan
Berkesinambungan*

Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 km². Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep.

Table 1.2 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumenep

Kecamatan		Jumlah Desa	Luas Area (Km ²)	Persentase
10	Pragaan	14	57,84	2,76
20	Bluto	20	51,25	2,45
30	Saronggi	14	67,71	3,23
40	Giligenting	8	30,32	1,45
50	Talango	8	50,27	2,4
60	Kalianget	7	30,19	1,44
70	Kota Sumenep	16	27,84	1,33
71	Batuan	7	27,1	1,29
80	Lenteng	20	71,41	3,41
90	Gading	14	53,97	2,58
100	Guluk-Guluk	12	59,57	2,85
110	Pasongsongan	10	119,03	5,69

120	Ambunten	15	50,54	2,41
130	Rubaru	11	84,46	4,03
140	D a s u k	15	64,5	3,08
150	Manding	11	68,88	3,29
160	Batuputih	14	112,31	5,36
170	Gapura	17	65,78	3,14
180	Batang Batang	16	80,36	3,84
190	Dungkek	15	63,35	3,03
200	Nonggunong	8	40,08	1,91
210	G a y a m	10	88,4	4,22
220	R a a s	9	38,9	1,86
230	Sapeken	9	201,89	9,64
240	Arjasa	19	241,99	11,56
241	Kangayan	9	204,68	9,78
250	Masalembu	4	40,85	1,95

1. Kecamatan Pragaan

Kecamatan ini berada di pintu gerbang bagian ujung barat sebelah selatan Kabupaten Sumenep, berbatasan dengan Kecamatan Larangan (Kabupaten Pamekasan) di sebelah barat, Selat Madura di sebelah selatan, Kecamatan Bluto di sebelah timur, serta Kecamatan Guluk-guluk di sebelah utara.

Pusat pemerintahan Kecamatan Pragaan terletak di Desa Pragaan Laok. Secara administratif Kecamatan Pragaan terdiri dari desa-desa sebagai berikut:

1. Kelurahan/Desa Aengpanas
2. Kelurahan/Desa Jaddung
3. Kelurahan/Desa Kaduara Timur
4. Kelurahan/Desa Karduluk
5. Kelurahan/Desa Larangan Pereng

6. Kelurahan/Desa Pakamban Daya
7. Kelurahan/Desa Pakamban Laok
8. Kelurahan/Desa Pragaan Daya
9. Kelurahan/Desa Pragaan Laok
10. Kelurahan/Desa Prenduan
11. Kelurahan/Desa Rombasan
12. Kelurahan/Desa Sendang
13. Kelurahan/Desa Sentol Daya
14. Kelurahan/Desa Sentol Laok

Gambar 1.3 Peta Kecamatan Pragaan



Desa Pakamban Daya dan Desa Jaddung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pragaan. Desa Pakamban Daya secara Geografis berada di $113^{\circ}38''$ BB, $113^{\circ}39''$ BT, dan $7^{\circ}4''$ LU, $7^{\circ}6''$ LS. Dengan Topografi wilayah Desa Pakamban Daya berada pada ketinggian 0 – 200 m dari permukaan air laut, dimana kondisi daratan dengan kemiringan $<20\%$ sebanyak 223 Ha dan berombak dengan kemiringan 3,1 – 15 % sebanyak 25 Ha. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Pakamban Daya beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32°C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober. Iklim Desa Pakamban Daya sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Sumenep, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April - Nopember.

Secara Administrasi Desa Pakamban Daya terletak sekitar 4 Km dari Kantor Kecamatan Pragaan, \pm 37 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pordapor dan Desa Guluk-guluk, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jaddung, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pakamban Laok, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Desa Sentol Daya dan Desa Sentol Laok. Luas wilayah Desa Pakamban Daya sebesar 313,60 Ha.

Sedangkan Desa Jaddung secara geografis berada di 42.1000 mT-42.6000 mT-9123000mU-9119000mU. Dilihat dari Topografi ketinggian Desa Jaddung berada pada 30 m ketinggian dari permukaan air laut dengan keadaan curah hujan rata-rata 20 mm/tahun, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30^oc dengan kelembaban udara rata-rata 70% pertahun. Secara Administrasi Desa Jaddung terletak diwilayah Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Wilayah Desa Jaddung secara administratif dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Guluk-Guluk Barat Kecamatan Guluk-Guluk, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura, sedangkan disisi barat berbatasan dengan Desa Pakamban Daja dan Desa Pakamban Laok sedangkan disisi timur berbatasan dengan Desa Pragaan Daja dan Desa Pragaan Laok. Luas wilayah Desa Jaddung sebesar 683,70 Ha yang terdiri dari 5 Dusun untuk.

2. Kecamatan Guluk-Guluk

Secara umum kondisi sosial Kecamatan Guluk-Guluk tidak sedikit berbeda dengan Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sumenep. Kecamatan Guluk-Guluk mempunyai beberapa desa, yaitu:

1. Kelurahan/Desa Bakeyong
2. Kelurahan/Desa Batuampar
3. Kelurahan/Desa Bragung \
4. Desa Guluk Guluk
5. Desa Ketawang Laok
6. Kelurahan/Desa Pananggungan

7. Kelurahan/Desa Payudan Daleman
8. Kelurahan/Desa Payudan Dundang
9. Kelurahan/Desa Payudan Karang Sokon
10. Kelurahan/Desa Payudan Nangger
11. Kelurahan/Desa Pordapor
12. Kelurahan/Desa Tambuko

Gambar 1.4 Peta Kecamatan Guluk-Guluk



Desa Bragung dan Payudan Daleman salah satu desa yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk. Luas wilayah Desa Bragung sebesar 657,728Ha atau 6.577286 km². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan prasarana umum diantaranya luas tanah untuk jalan 7.728 Ha; luas tanah untuk Pemukiman 24,729 Ha; luas tanah untuk pemakaman 0,579 Ha.

Sedangkan untuk luas wilayah Desa Payudan Daleman sebesar 657,728Ha atau 6.577286 km². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan prasarana umum diantaranya luas tanah untuk jalan 7.728 Ha; luas tanah untuk Pemukiman 24,729 Ha; luas tanah untuk pemakaman 0,579 Ha.

3. Kecamatan Ganding

Ganding adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di arah barat kota sumenep Pulau Madura

1. Kelurahan/Desa Bataal Barat
2. Kelurahan/Desa Bataal Timur
3. Kelurahan/Desa Bilapora Barat
4. Kelurahan/Desa Bilapora Timur
5. Kelurahan/Desa Gadu Barat
6. Kelurahan/Desa Gadu Timur
7. Kelurahan/Desa Cempaka
8. Kelurahan/Desa Ketawang Daleman
9. Kelurahan/Desa Ketawang Karay
10. Kelurahan/Desa Ketawang Larangan
11. Kelurahan/Desa Ketawang Parebaan
12. Kelurahan/Desa Rombiya Barat
13. Kelurahan/Desa Rombiya Timur
14. Kelurahan/Desa Talaga

Desa Ketawang Karay terletak sekitar 20 m dari kantor Kecamatan Ganding, kurang lebih 21 Km dari Kabupaten Sumenep, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Prancak dan Desa Cempaka Kecamatan Pasongsongan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gadu Barat. Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ketawang Daleman dan Desa Ketawang Larangan sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk. Luas wilayah Desa Ketawang Karay sebesar 657,728Ha atau 6.577286 km².

Gambar 1.4 Peta Desa Ketawang Karay



Sedangkan Luas wilayah Desa Bataal Barat sebesar 657,728Ha atau 6.577286 km². Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan prasarana umum diantaranya luas tanah untuk jalan 7.728 Ha; luas tanah untuk Pemukiman 24,729 Ha; luas tanah untuk pemakaman 0,579 Ha.

Hasil Analisis

Menurut Oemar Hamalik (2008) “kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, sosial dan emosional”.

Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan, karena suatu kesiapan merupakan suatu pondasi dasar bagi suatu masyarakat atau pemerintah dalam menindaklanjuti terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan kedepannya.

Kesiapan masyarakat dalam program JKN-KIS adalah suatu kondisi seseorang yang harus siap dalam menerima program JKN-KIS yang dapat

diketahui ketika seseorang tersebut memberikan respon terhadap program JKN-KIS tersebut.

Kesiapan masyarakat mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS serta kemampuan masyarakat untuk membayar iuran yang telah ditetapkan oleh BPJS.

Untuk mengetahui seberapa besar kesiapan masyarakat guna menerima program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS perlu dilakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat di beberapa desa yang tersebar ditiga kecamatan sebagai sampling penelitian.

Gambar 2.1 Wawancara dengan Sekdes Desa Pakamban Daya



Pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding dapat terhadap program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS adalah sebagian besar masyarakat pernah mendengar tapi tidak mengetahui program JKN-KIS. Sementara sebagian lagi belum pernah mendengar sama sekali tentang program JKN-KIS tersebut.

Gambar 2.2 Wawancara dengan Perangkat Desa Bataal Barat



Sebagian masyarakat ada yang punya keinginan untuk mengurus menjadi keanggotaan BPJS Kesehatan. Namun, masih belum mengerti akan manfaat sistem jaminan kesehatan ini sehingga niatnya pun kurang bulat. Selain memang tidak sempat karena mungkin banyak kerjaan, juga karena belum mengerti fungsinya.

Gambar 2.3 Wawancara dengan Masyarakat Desa Pakamban Daya



Sesuai UU No. 40 Tahun 2004 Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pemerintah Indonesia terus melakukan pembenahan, baik sistem, regulasi, dan kelembagaan institusi penyelenggara BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan kepada peserta/masyarakat dari hari ke hari menjadi semakin baik.

Walaupun perbaikan dan pembenahan oleh pemerintah terus dilakukan, masalah penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat masih saja terjadi. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumenep, terutama yang bermukim di wilayah pedesaan seperti pedesaan yang berada di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding banyak yang tidak mengetahui adanya program pemerintah ini. Ada juga masyarakat yang mengetahui mengenai program JKN-KIS adalah bantuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

Gambar 2.4 Wawancara dengan Masyarakat Jaddung



Adapun yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, tidak memiliki pengetahuan tentang subansi program jaminan sosial termasuk prosedur mendapatkan pelayanan kesehatan. Bahkan masih ada keluhan peserta tentang pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan program sosial gotong royong wajib ini, sehingga masyarakat menganggap lebih baik menggunakan biaya sendiri dari pada menggunakan BPJS.

Sedangkan mengenai kemampuan masyarakat dalam membayar iuran JKN-KIS dapat diketahui bahwa masyarakat yang membayar iuran kepersertaan JKN hanya pada saat sakit saja.

Gambar 2.5 Wawancara dengan Kepala Desa Payudan Daleman



Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diantaranya

adalah kegotongroyongan. Prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan saja.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding merasa kurang mampu untuk membayar iuran JKN-KIS. Hal ini karena jumlah keluarga di KK itu sangatlah besar dalam satu rumah, sedangkan sumber penghasilan masih dari satu sumber.

Gambar 2.6 Wawancara dengan Masyarakat Ketawang Karay



Dalam sistem baru ini peserta mandiri diharuskan membayar iuran secara kolektif yang mencakup seluruh nama dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar. Artinya, setiap bulan, peserta mandiri harus membayar total tagihan seluruh anggota keluarga secara akumulatif. Namun, sistem tersebut dinilai akan memberatkan para peserta khususnya peserta dari kalangan menengah ke bawah. Kewajiban untuk membayar penuh iuran setiap bulan untuk satu Kartu Keluarga (KK) masyarakat di Kecamatan Ganding sangat membebani rakyat kecil serta menyulitkan peserta mandiri dari kelompok menengah ke bawah yang tidak bisa mencicil pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Ada juga masyarakat yang menganggap bahwa iuran bulanan kurang logis. Hal ini dikarenakan setelah membayar terkadang ada keluhan

masyarakat tentang pelayanan, yang dianggap lebih baik menggunakan biaya sendiri dari pada menggunakan BPJS.

Disamping demikian, peneliti menemukan beberapa kendala masyarakat dalam mendukung program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding adalah sebagai berikut:

- a. Kepersertaan yaitu penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- b. Ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah
- c. Masyarakat tidak memahami alur JKN
- d. Kurangnya sosialisasi oleh pihak BPJS
- e. Penetapan orang tidak mampu / miskin untuk peserta PBI tidak sesuai dengan fakta
- f. Kurangnya pelayanan kesehatan

Oleh karena itu perlu adanya solusi sebagai upaya untuk mengatasi kendala masyarakat dalam mendukung Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding antara lain:

- a. Mekanisme pendaftaran perlu diperbaiki
- b. Ada usaha dari desa yang dibantu pemerintah
- c. Adanya pemasaran sosial dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat
- d. Adanya media sosialisasi dari semua pihak atau semacam kader dari JKN-KIS
- e. Penetapan orang tidak mampu untuk peserta PBI harus sesuai dengan fakta
- f. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu ditingkatkan lagi

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait program JKN-KIS, minimnya kesiapan masyarakat terhadap Program JKN-KIS terbukti adanya temuan kendala namun, peneliti juga telah menganalisis upaya untuk mengatasi kendala masyarakat dalam mendukung Program JKN-KIS

oleh BPJS Kesehatan di Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Pragaan, Guluk-Guluk, dan Ganding antara lain:

1. Perlu diperbaiki dalam mekanisme pendaftaran itu karena Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2016 yang telah diubah menjadi Perpres No. 28 Tahun 2016 menyebut NIK bukan syarat wajib kepesertaan.
2. Menurut peneliti ada rekomendasi DJSN membatasi pelayanan sebanyak 3 kali itu ditujukan kepada peserta yang terdaftar di faskes yang masih dalam satu kabupaten/kota.
3. BPJS Kesehatan dituntut mampu mengumpulkan informasi tentang kemampuan dan ketersediaan tempat tidur di askes yang bekerjasama.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan tentang kesiapan masyarakat terhadap program JKN-KIS sangatlah minim berdasarkan temuan peneliti, ada yang belum pernah mendengar sama sekali tentang program JKN BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau BPJS, ada juga masyarakat belum paham akan hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN-BPJS Kesehatan dikarenakan :

- a. Masyarakat tidak tahu tentang obat-obatan yang ditanggung dan tidak ditanggung dalam pelayanan BPJS.
- b. Ketidapkahaman masyarakat tentang fasilitas kesehatan (faskes) primer dan prosedur rujukan berjenjang.
- c. Ketidapkahaman masyarakat tentang cara pindah faskes bagi anggota keluarga yang sedang mengikuti pendidikan atau bekerja di luar daerah.
- d. Petugas kesehatan di tingkat bawah minim pengetahuan tentang BPJS. Padahal masyarakat cenderung bertanya tentang BPJS pada petugas kesehatan di tingkat bawah (staf puskesmas, pustu, polindes).

Peserta tidak memiliki pemahaman yang baik tentang cara untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan, karena kepesertaannya tidak diurus sendiri tetapi diurus orang lain.

Menurut peneliti Ketidak tahuan masyarakat tentang program kepesertaan wajib itu pun beralasan. belum ada sosialisasi tentang BPJS

Kesehatan belum maksimalnya sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan oleh pihak BPJS. Padahal, sejak dioperasikannya program BPJS, bersamaan pula badan penyelenggara mulai beroperasi di kabupaten sumenep. Program ini sangatlah penting asalkan tepat sasaran dan perlunya sosialisasi untuk program ini.

Masyarakat yang membayar iuran kepesertaan JKN hanya pada saat sakit saja. Setelah berobat atau setelah mendapat pelayanan kesehatan mereka menghentikan kepesertaan termasuk berhenti membayar iuran halini dianggap bahwa Iuran bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri dianggap masyarakat terlalu mahal.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24/ 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pustaka Mahardika, Jgj, 2012.
- Buku Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif, tentang Kesehatan.* 2014.
http://diskes.jabarprov.go.id/application/modules/pages/files/Buku_Pedoman_DesasiagaAktif Diterbitkan oleh dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat.
- Fandy, Tjiptono. 2006. *Manajemem Pelayanan Jasa*, Yogyakarta: Andi Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*: Balai Pustaka Dekdikbud
- Korten, David D. Dan sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kotler, Dan Killer. 2009. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Earlangga
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Parasuraman,A, Valerie A.Zeithaml, Leonard L.Berry.1998 *SERVQUAL ;A Mutiple Item Scal For Maesurung Consumer Prensipsioan Of Service Quality*.(jurnal).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.* (Online), (www.inherent-dikti.net), diakses 8 April 20123.
- Soekanto,. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Malang: Jakarta Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- _____.2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1992 No 23, tentang Kesehatan.* Surabaya: Ariloka.
- Tim Penyusun Bahan Sosialisasi dan Advokasi JKN, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial, Nasional Tim Penerbit Buku Biru, 2012, Kitab Undang -Undang Tentang Kesehatan & Kedokteran, Diva press, Jogyakarta, Cetakan Pertama